ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TENGAH

(2010-2017)

SKRIPSI

Oleh:

Nama	:Naelul Autor
Nomor Mahasiswa	:14313145
Program Studi	:Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TENGAH

TAHUN (2010 – 2017)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Naelul Autor

Nomor Mahasiswa :14313145

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusun skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2018

Naelul Autor

ii

PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TENGAH

TAHUN (2010 – 2017)

Nama : Naelul Autor

Nomor Mahasiswa : 14313145

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, ~~31 Juli~~ 15-8- 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing, ACC untuk ujian

Suharto,,SE., M.Si.

iii

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2017

Disusun Oleh : **NAELUL AUTOR**

Nomor Mahasiswa : **14313145**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 21 September 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si. .....

Penguji : Aminuddin Anwar, SE., M.Sc. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmatnya

Skripsi ini dapat diselesaikan

Karya ini merupakan salah satu bentuk dharma baktiku

kepada papah dan mamah tercinta

Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, kesabaran dukungan, kpercayaan dan doa tulus yang selalu dipanjatkan kepadaku

Karya ini juga kupersembahakn kepada adik-adikku tersayang

Terimakasih telah meberikan dukungan serta doa dalam sujudmu

Tetap semangat untuk menggapai cita-cita

Karya ini juga kupersembahkan kepada teman-teman seperjuangan yang sudah banyak membantu dalam proses pembuatan karya ini, Terimakasih atas dukungan serta bantuan yang engkau kerahkan Terimakasih sudah bersabar menerima keluh kesah selama proses pembuatan karya ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah Tahun 2010-2017".

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Suharto,, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing dengan kesabarannya telah banyak mengarahkan dan memberikan masukan-masukan serta nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Akhsyim Afandi Drs.,MA.Ec.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Unggul Priyadi, Dr., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.
6. Semua teman – teman Ilmu Ekonomi 2014 yang mendukung baik di perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii
HALAMAN BERITA ACARA TUGAS AKHIR iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN KATA PENGANTAR vi
HALAMAN DAFTAR ISI viii
HALAMAN DAFTAR TABEL xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
BAB I
PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Batasan Masalah 7
1.3 Rumusan Masalah 7
1.4 Tujuan Penelitian 8
1.5 Manfaat Penelitian 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
2.1 Kajian Pustaka 10
2.2 Landasan Teori 17
2.2.1 Definisi Pembangunan Ekonomi 17
2.2.2 Definisi Pembanguna Ekonomi Daerah 19

2.2.3 Definisi Kesenjangan 19
2.2.4 Definisi Pendapatan 20
2.2.5 Ketimpangan Distribusi Pendapatan 21
2.2.6 Indeks Williamson 26
2.2.7 Kurva Lorenz 28
2.2.8 Indeks Gini 29
2.2.9 PDRB 30
2.2.10 Inflasi 33
2.2.11 Jumlah Penduduk 35
2.3 Pengaruh Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen 37
2.3.1 Pengaruh Pdrb terhadap Kempangan Pendapatan 37
2.3.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan 38
2.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan 39
2.3.4 Kerangka Pemikiran 40
2.3.5 Hipotesis Penelitian 41
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Sumber Data 42
3.2 Variabel Penelitian 43
3.3 Definisi Operasional Variabel 43
3.4 Metode Analisis 44
3.4.1 Model Regresi Data Panel 46
3.4.2 Uji Pemilihan Model Regresi 48
3.4.4 Uji Statistik 50
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Data Penelitian 52
4.2 Pemilihan Model 52

4.2.1 Uji Chow Test 52
4.2.2 Uji Hausman Test 54
4.2.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model 54
4.2.4 Koefisien Determinasi 57
4.2.5 Uji Signifikansi Simultan 57
4.2.6 Uji Signifikansi Paramter 57
4.3 Analis Ekonomi 79
4.3.1 Analis Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Pendapatan 61
4.4.2 Analis Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan 62
4.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan 62
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
5.1 Kesimpulan 63
5.2 Implikasi 65
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN 68

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah	3
1.2 Rasio Gini (%) Provinsi Seluruh Indonesia	5
4.1 Uji Chow	53
4.2 Uji Hausman	54
4.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model	54
4.4 Hasil Regresi Pengujian Hipotesis	58
4.5 Intersep antar kabupaten di Jawa Tengah	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kurva Kemungkinan Produksi	22
2.2 Hipotesis U-terbalik Kuznets	23
2.3 Kurva Lorenz	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

I. Data Penelitian 69
II. Hasil Estimasi Linier CEM 76
III. Hasil Estimasi Linier FEM 76
IV. Hasil Estimasi Linier REM 78
V. Intersep antar kabupaten di Jawa Tengah 79

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2017. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini diantaranya yaitu PDRB (ADHK), Inflasi, dan Jumlah Penduduk dengan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan *software Eviews 8.* Data panel yaitu gabungan antara data cross section dan data time series. Adapun model yang paling tepat dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *fixed effect* setelah melakukan *uji chow dan uji hausman.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB (ADHK) dan Jumlah penduduk berpengaruh positi dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017. Kemudian untuk variabel Inflasi berpengaruh negative dan tidak siginiikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017.

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, PDRB (ADHK), Inflasi, Jumlah Penduduk

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka Panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata lain bersifat *self generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya. (Boediono,1994).

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada yang di capai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka Panjang. Disini proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya

diukur dengan pertambahan PDB (Produk Domestik Bruto) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad,1999).

Menurut Sadono (1994), Pertumbuhan ekonomi itu sendiri artinya adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun ini berarti bahwa untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harus membandingkan pendapatan rill daerah yang bersangkutan dari tahun ke tahun indikator yang digunakan adalah PDRB. Kita bisa melihat dari PDRB sejauh mana pembangunan telah berhasil menyejahterakan rakyatnya, dengan kata lain pemerataan pendapatan. Dari data yang diperoleh melalui BPS nilai PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan mempunyai nilai yang cukup bervariatif tentunya hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu sumber daya di setiap daerah, infrastruktur, Kebijakan-Kebijakan pemerintah yang di terapkan masing-masing daerah dan mungkin hal ini bisa terjadi di setiap provinsi yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

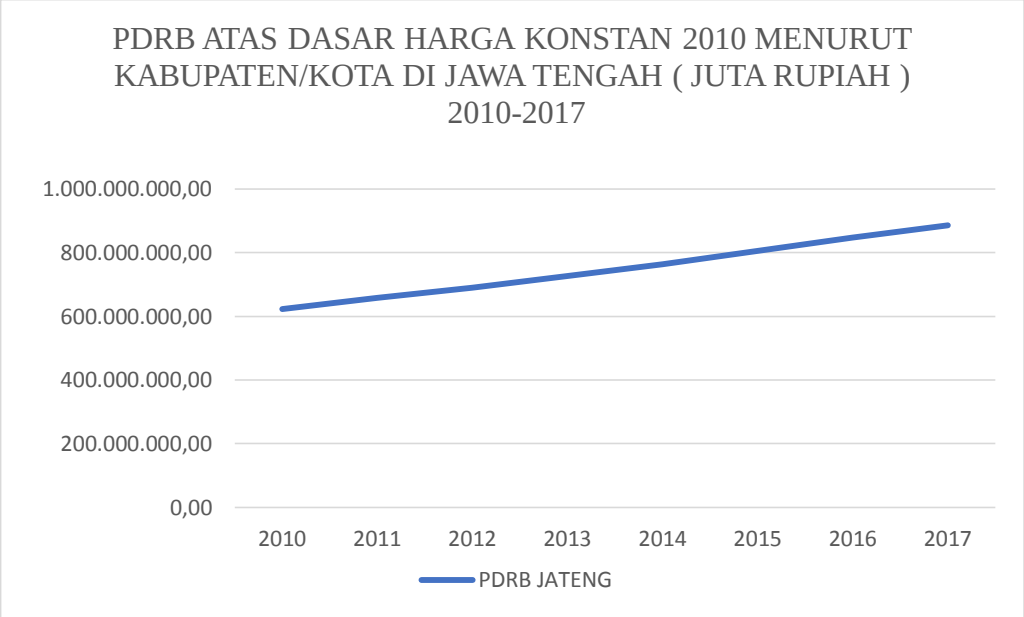

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami tren positif dalam kurun waktu 8 tahun 2010-2017, Setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tentu saja hal ini merupakan pencapain yang cukup baik. Karena setiap wilayah menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai salah satu tujuan pembangunan wilayahnya, kinerja perekonomian dikatakan mengalami suatu kemajuan apabila tingkat pertumbuhan ekonomi pada saat ini lebih tingi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka suatu wilayah dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Diatas terlihat bahwa PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup

signifikan dari tahun ke tahun. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Tengah mengindikasikan terjadi peningkatan pula terhadap aktivitas ekonomi. Contohnya seperti lapangan pekerjaan ketika lapangan itu terbuka luas maka akan banyak tenaga kerja yang terserap, ketika tenaga kerja terserap maka akan mengurangi ketimpangan pendapatan yang ada di Jawa Tengah karena masyarakat akan memperoleh pendapatan dari adanya lapangan pekerjaan tersebut. Namun tidak memungkiri terjadi ketimpangan di setiap daerah, karena data di atas adalah gambaran secara umum dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di jawa tengah. Dengan adanya dugaan ketimpangan yang tejadi di setiap kabupaten/Kota. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut, Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang ada di Jawa Tengah.

Di Indonesia ketimpangan pembangunan tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumberdaya alam, letak geografis, kualitas sumberdaya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas social dan politik nasional. Selain itu juga disebabkan karena mekanisme pasar, baik input maupun output terutama capital dan tenaga kerja dengan keterampilan atau Pendidikan tinggi yang terdistorsi oleh kebijakan pemerintah yang bias ke provinsi dan di sektor- sektor tertentu. Akibat distorsi tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi (Tambunan, 1996;206-207).

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Ratio Gini.Nilai Ratio Gini berkisar antara nol dan satu bila Ratio Gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun apabila ratio gini sama dengan satu maka menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati satu orang saja (Kuncoro, 1997:133).

Tabel 1.2 Rasio Gini (%) Provinsi Seluruh Indonesia

Provinsi	Gini Rasio							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ACEH	0.3	0.33	0.32	0.34	0.32	0.33	0.33	0.32
SUMATERA UTARA	0.35	0.35	0.33	0.35	0.32	0.34	0.31	0.31
SUMATERA BARAT	0.33	0.35	0.36	0.36	0.33	0.34	0.33	0.31
RIAU	0.33	0.36	0.4	0.37	0.35	0.36	0.34	0.32
JAMBI	0.3	0.34	0.34	0.35	0.33	0.36	0.34	0.33
SUMATERA SELATAN	0.34	0.34	0.4	0.38	0.4	0.36	0.34	0.36
BENGKULU	0.37	0.36	0.35	0.39	0.36	0.38	0.35	0.35
LAMPUNG	0.36	0.37	0.36	0.36	0.35	0.38	0.36	0.33
KEP. BANGKA BELITUNG	0.3	0.3	0.29	0.31	0.3	0.28	0.27	0.28
KEP. RIAU	0.29	0.32	0.35	0.36	0.4	0.36	0.35	0.33
DKI JAKARTA	0.36	0.44	0.42	0.43	0.43	0.43	0.41	0.41
JAWA BARAT	0.36	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40
JAWA TENGAH	0.34	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.36	0.36
DI YOGYAKARTA	0.41	0.4	0.43	0.44	0.42	0.43	0.42	0.43
JAWA TIMUR	0.34	0.37	0.36	0.36	0.37	0.42	0.40	0.39
BANTEN	0.42	0.4	0.39	0.4	0.4	0.4	0.39	0.38
BALI	0.37	0.41	0.43	0.4	0.42	0.38	0.36	0.38
NUSATENGGARA BARAT	0.4	0.36	0.35	0.36	0.38	0.37	0.35	0.37

NUSA TENGGARA TIMUR	0.38	0.36	0.36	0.35	0.36	0.34	0.33	0.35
KALIMANTAN BARAT	0.37	0.4	0.38	0.4	0.39	0.33	0.34	0.32
KALIMANTAN TENGAH	0.3	0.34	0.33	0.35	0.35	0.33	0.33	0.34
KALIMANTAN SELATAN	0.37	0.37	0.38	0.36	0.36	0.35	0.33	0.34
KALIMANTAN TIMUR	0.37	0.38	0.36	0.37	0.35	0.32	0.31	0.33
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	0.29	0.30	0.30
SULAWESI UTARA	0.37	0.39	0.43	0.42	0.42	0.37	0.38	0.39
SULAWESI TENGAH	0.37	0.38	0.4	0.41	0.37	0.37	0.36	0.35
SULAWESI SELATAN	0.4	0.41	0.41	0.43	0.42	0.42	0.42	0.40
SULAWESI TENGGARA	0.42	0.41	0.4	0.43	0.41	0.4	0.40	0.39
GORONTALO	0.43	0.46	0.44	0.44	0.41	0.42	0.41	0.43
SULAWESI BARAT	0.36	0.34	0.31	0.35	0.35	0.36	0.36	0.35
MALUKU	0.33	0.41	0.38	0.37	0.35	0.34	0.34	0.34
MALUKU UTARA	0.34	0.33	0.34	0.32	0.32	0.28	0.28	0.31
PAPUA BARAT	0.38	0.4	0.43	0.43	0.44	0.44	0.37	0.39
PAPUA	0.41	0.42	0.44	0.44	0.41	0.42	0.39	0.39
INDONESIA	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.39	0.39

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)

Tabel 1.2 menjelaskan Gini Rasio di Jawa Tengah pada tahun 2010-2017 terindikasi tidak terjadi penurunan yang cukup signifikan hanya terjadi penurunan pada tahun 2013-2014 semula 0.39% menjadi 0.38%, dan 2015-2016 semula 0.38% menjadi 0.36% sebagian besar malah meningkat atau tetap berada pada tingkat ketimpangan pada tahun sebelumnya. Sedangkan setiap tahunnya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yang cenderung mengalami trend positive, namun tidak mampu menurunkan indeks gini, hal ini menunjukkan pembangunan ekonomi belum mampu menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat. Rata-Rata tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Jawa Tengah berada pada tingkat ketimpangan sedang, akan tetapi perlu adanya

kajian secara ilmiah agar tingkat ketimpangan menurun menjadi ringan serta menghindari kemungkinan terjadinya peningkatan ketimpangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, gini rasio di Jawa Tengah mengalami fluktuasi yang membuat penulis tertarik serta menganggap pentingnya untuk dilakukan pnelitian mengenai "faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun (2010-2017).

1.2 Batasan Masalah

Tujuan adanya pembatasan masalah ini adalah agar dalam penelitian yang dilakukan tidak meluas yang akan menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pemahaman yang sudah di pelajari dan di sesuaikan dengan tujuan proposal ini. Sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang nantinya akan dibahas dalam skripsi. Permasalahan yang dibahas dalam proposal ini yaitu analisis faktor- faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah pada tahun 2010-2017 dengan variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) dan beberapa variabel independent yang digunakan yaitu PDRB atas dasar harga konstan, Inflasi dan Jumlah Penduduk. Penelitan ini menggunakan alat analisis linier berganda data Panel dengan 232 observasi terhitung sejak tahun 2010-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menutup kemungkinan masih terjadinya kesenjangan distribusi pendapatan di satu daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan

analisis yang mendalam untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan pendapatan yang terjadi di daerah tersebut. Tentu hal ini adalah masalah yang membelenggu yang masih terjadi sampai saat ini. Berdasarkan uraian diatas, maka diruTuskan beberapa rumusan masalah yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh PDRB atas dasar harga konstan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2017.
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2017.
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis pengaruh PDRB atas dasar harga konstan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2017.
2. Mengetahui serta menganalisis pengaruh Inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2017.
3. Mengetahui serta menganalisis pengaruh Jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk penulis, dengan adanya penelitian ini dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana serta dapat menambah pengetahuan tentang penelitian yang berkaitan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi pemerintah daearh dan pusat diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perencanan pembangunan di Indonesia maupun di daerah daerah lainnya
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan diharapakan penelitian ini bisa menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi para pembaca dan satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.

BAB II

Kajian Pustaka dan Landasan Teori

2 Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Nugroho (2014) Penelitian ini berjudul "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2011". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas tahun 2002-2011. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder, menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan 2000, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk tahun 2002-2011. Data diperoleh dari BPS Kabupaten Banyumas serta Pemerintah Daerah. Model analisis yang digunakan adalah analisis Tipologi Klassen, perhitungan Indeks Williamson, analisis Korelasi Produk Momen dari Pearson, analisis Trend dan Granger Causality Test. Berdasarkan hasil perhitungan analisis Tipologi Klassen, sebagian besar (55,55 persen) kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk kedalam kuadran IV atau daerah relatif tertinggal. Analisis Trend menunjukkan bahwa trend pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2011 menunjukan trend yang menaik, demikian pula dengan trend ketimpangan pendapatan menunjukan

trend yang menaik. Sedangkan, peningkatan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui perbaikan atau penambahan sarana pendidikan. Dengan nilai Indeks Williamson yang tinggi, diharapkan agar konsentrasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyumas tidak hanya terpusat di kecamatan dengan PDRB tinggi. Masyarakat dapat meningkatkan pendapatan melalui investasi dengan dana kredit mikro, serta perpindahan arus produksi yang lancar guna meningkatkan pertumbuhan di daerah yang masih tertinggal.

Pramulyawan (2010) dalam penelitian yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2001-2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karanganyar, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karanganyar serta klasifikasi kawasan ketimpangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari hasil publikasi BPS yang mencakup: Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2001-2008, Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2001-2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karanganyar atas dasar harga konstan tahun 2001-2008, PDRB perkapita Kabupaten Karanganyar atas dasar harga konstan tahun 2001-2008. Klasifikasi kecamatan dihitung menggunakan Tipologi Klassen, sedangkan untuk ketimpangan pendapatan dihitung menggunakan Indeks

Williamson, kemudian Korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hasil analisis dengan Tipologi Klassen menujukkan bahwa kecamatan di Kabupaten Karanganyar kebanyakan masuk dalam daearah berkembang cepat dan daerah relatif tertinggal. Untuk hasil analisis dengan menggunakan Indeks Williamson, di dapat bahwa tingkat ketimpangan Kabupaten Karanganyar berkisar antara 0,89 sampai dengan 0,92 sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar masuk dalam kawasan ketimpangan besar. Untuk hasil perhitungan dengan menggunakan Korelasi Pearson dapat diketahui bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah tidak signifikan. Mengacu pada hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran kepada Pemerintah Daearah Kabupaten Karanganyar yaitu pertama, mengarahkan atau memprioritaskan perencanaan pembagunan bagi daerah yang relatif tertinggal dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan PDRB tanpa harus memperbesar ketimpangan pendapatan.

Raswita dan Utama (2013) dalam penelitian yang berjudul Analisis petumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan stuktur pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan data sekunder selanjutnya dianalisis dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, Indeks Williamson dan Regresion

Curve Estimation. Hasil analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Gianyar diklasifikasikan menjadi empat: daerah maju dan cepat tumbuh, daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, daerah maju tetapi tertekan, dan daerah yang relatif tertinggal. Berdasarkan Indeks Williamson ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Gianyar secara umum meningkat dari periode 1993 sampai dengan 2009. Meskipun meningkat ketimpangannya masih relatif rendah rata - rata nilainya sebesar 0,300 (masih dibawah 0,5). Hipotesis Kuznets yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang berbentuk U terbalik berlaku di Kabupaten Gianyar Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan disarankan agar memprioritaskan daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju, memperhatikan aspek pemerataan dengan pemerataan hasil - hasil pembangunan.

Tarsil (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis Ketimpangan Pendpatn di Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk terpadat pertama di Indonesia terlepas dari masalah Ketimpangan Pendapatan. Masalah yang dihadapi diantaranya Pertumbuhan Ekonomi yang tidak merata di setiap Kabupaten/Kota dan Aglomerasi yang cenderung tinggi di setiap Kota/Kabupaten hal ini yang menjadi faktor terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.Pengolahan data menggunakan OLS (Ordinary Least Square)

dengan pengambilan model terbaik yaitu Fixed effect model dengan dibantu software eviews 9 dalam pengoperasiannya. Hasil penelitian ini adalah menunjukan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisiensi sebesar -0,01266 artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0,12% dan variabel aglomerasi memiliki pengaruh positif dengan nilai koefisiensi sebesar 14,74358 artinya setiap kenaikan Aglomerasi sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 14,74%.

Nurlaili (2016) Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi ketimpangan distibusi pendapatan di pulau jawa tahun 2007-2013. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara adalah tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2007-2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa crosssection 6 provinsi se Jawa dan time series selama 2007-2013. Data diolah dengan analisis data panel dengan regresi fixed effect model. Seluruh variabel penelitian berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara parsial variabel PDRB per kapita, populasi penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan,

sementara derajat desentralisais fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Putra (2011) Dalam penelitian yang berjudul Analisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi jawa tengah periode 2000-2007. Kemiskinan selalu menjadi masalah di setiap negara sedang berkembang, bahkan di negara maju pun juga. Di Indonesia, tingginya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya adanya ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan antar satu provinsi dengan provinsi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari ketimpangan distribusi pendapatan, yang diukur menggunakan Indeks Gini dan Indeks Williamson, terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2000 hingga tahun 2007. Salah satu penyebab utama kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ialah dikarenakan adanya ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan pada tiap Kabupaten/kotanya, untuk menekan tingkat kemiskinan tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta Pemerintah Daerah harus bisa bekerja sama untuk memperkecil perbedaan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan agar jangan terlalu tinggi antara satu Kabupaten/kota dengan yang lain. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan log linear dengan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel dependen dan dua variabel independen yaitu, Indeks Gini dan Indeks Williamson

sebagai alat ukur ketimpangan distribusi pendapatan. Setelah dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yang terdiri dari uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas, ternyata hasilnya menunjukkan data terdistribusi normal. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai F sebesar 16,686 (probabilitas = 0,006) dan koefisien determinasi (adjusted R2) sebesar 0,870. Melalui regresi dapat diperoleh hasil bahwa Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat ketimpangan pendapatan distribusi pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Williamson (dengan nilai 1,834) dan Indeks Gini (dengan nilai 0,477). Maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Williamson lebih berpengaruh dibandingkan Indeks Gini.

Munandar dkk (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan antara Kebijakan Moneter dengan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan, menjelaskan bahwa secara teoritis kebijakan kebijakan moneter berhati-hati, yang mengusahakan ninflasi yang rendah dan ekonomi makro yang stabil, justru merupakan kebijakan yang menurunkan tingkat kemiskinan dan menghasilkan distribusi pendapatan lebih baik. Dengan menggunakan basis data regional ke-26 Provinsi di Indonesia Periode 1984-2005, kajian ini secara empiris membutuhkan bahwa kebijakan moneter berhati-hati (prudent) merupakan kebijakan moneter yang berpihak pada si msikin (pro poor).

Albanesi (2007) menawarkan penjelasan teoritis mengapa ditemukan hubungan positif antara inflasi dan ketimpangan pada data lintas negara. Albanesi

mengemukakan bahwa korelasi positif tersebut merupakan buah dari konflik yang terjadi antara bagian yang bersebrangan pada distribusi pendapatan yang disebabkan oleh kerapuhan golongan berpendapatan rendah terhadap inflasi. Secara teoritis kebijakan moneter longgar (ekspansif) akan menurunkan pengangguran, meningkatkan output dan meningkatkan inflasi dalam jangka pendek. Namun diyakini pula bahwa dampak kebjakan ekspansif ini hanya bersifat sementara karena adanya fluktuasi business cycle dan tidak disukainya inflasi yang tinggi, sehingga kebijakan moneter ini tidak dapat menghsilkan boom permanen. Di lain pihak kebijakan moneter yang berhati-hati, konsistensi dan kredibel adalah kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi dalam jangka Panjang dan menstabilkan fluktuasi permintaan agregat. Rendahnya inflasi dalam jangka Panjang serta stabilnya ekonomi makro merupakan situasi positif yang mendorong investasi sehingga dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan memperbaiki distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan orang miskin dapat meningkat secara permanen (dalam Haris Munandar dkk, 2007)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Pembangunan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara – negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut: economic development is growth plus change, yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan –

perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pandapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan (Sukirno, 1994: 415).

Yang perlu diingat, pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan – kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan di atas, maka pembangunan ekonomi pada umumnya disefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 1999: 11).

Menurut Michael P. Todaro (1993), pembangunan di semua negara memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
2. Meningkatkan taraf hidup, termasuk manambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan memperhatikan nilai – nilai budaya dan kemanusiaan. Semua itu bukan hanya

untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri, baik individu maupun bangsa.

3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap – sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara – negara lain, tetapi juga sumber – sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

2.2.2 Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999: 298).

2.2.3 Definisi Kesenjangan

Menurut Mubyarto (1995), kesenjangan dapat dibedakan menjadi:

1. Kesenjangan antar sektor, yaitu sektor industri dan sektor pertanian. Kesenjangan jenis ini merupakan masalah lama dan sudah menjadi bahan kajian para akar di banyak negara.

2. Kesenjangan antar daerah. Dalam sejarah, kesenjangan antar daerah terjadi antara wilayah Jawa dan Luar Jawa, dan sejak kemajuan Provinsi Bali yang luar biasa, menjadi kesenjangan "Jawa dengan Luar Jawa Bali".
3. Kesenjangan antar golongan ekonomi. Kesenjangan jenis ini adalah yang paling berat dan dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal / kapitalis, perekonomian yang tumbuh terlalu cepat justru mengakibatkan kesenjangan menjadi semakin parah.

2.2.4 Definisi Pendapatan

Menurut Hicks (1993), pendapatan adalah jumlah yang dapat dibelanjakan seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu, sementara nilai kekayaannya tetap utuh. Dalam melakukan pengukuran, nilai konsumsi ditambah perubahan nilai kekayaan harus sama dengan jumlah penerimaan, keuntungan dari penjualan aktiva, nilai tunjangan tambahan dan produksi untuk konsumsi keluarga dan sewa yang diperoleh. Namun, dalam prakter, hal ini sulit diterapkan, karena dalam pengukuran perubahan kekayaan terdapat penilaian kembali persediaan modal. Salah satu alternatif dalam mengukur pendapatan adalah melalui pengeluaran konsumsi. Konsumsi merupakan faktor yang relevan dalam penilaian kesejahteraan.

Raharja dan Manurung (membagi sumber penerimaan rumah tangga sebagai pendapatan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pendapatan dari gaji dan upah yang merupakan balas jasa sebagai tenaga kerja. Besar gaji / upah dipengaruhi produktivitas, diantaranya tingkat keahlian (skill), kualitas modal manusia (human capital), dan kondisi kerja (working condition).
2. Pendapatan dari aset produktif, berupa pemasukan balas jasa penggunaan, diantaranya aset finansial (deposito, modal dan saham), dan aset bukan finansial (rumah, tanah dan bangunan).
3. Pendapatan dari pemerintah (transfer payment), berupa pendapatan yang diterima sebagai balas jasa atas input yang diberikan, misalnya dalam bentuk subsidi, tunjangan atau jaminan sosial.

2.2.5 Ketimpangan distribusi pendapatan

Bigsten (1987) mengemukakan bahwa distribusi pendapatan pada sebuah perekonomian adalah hasil akhir dari seluruh proses ekonomi, yang artinya bahwa distribusi pendapatan pada prinsipnya harus memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhinya. Adam Smith dan Marx berpendapat bahwa persoalan pokok dari distribusi pendapatan adalah bagaimana hasil penjualan produk dibagi diantaranya upah, sewa dan laba.

Arsyad (1999) mengemukakan bahwa cara sederhana untuk mengetahui masalah distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi. Dalam hal ini, suatu perekonomian diasumsikan menjadi dua macam barang, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Produksi dianggap terjadi di sepanjang kurva kemungkinan produksi.

Kurva Kemungkinan Produksi

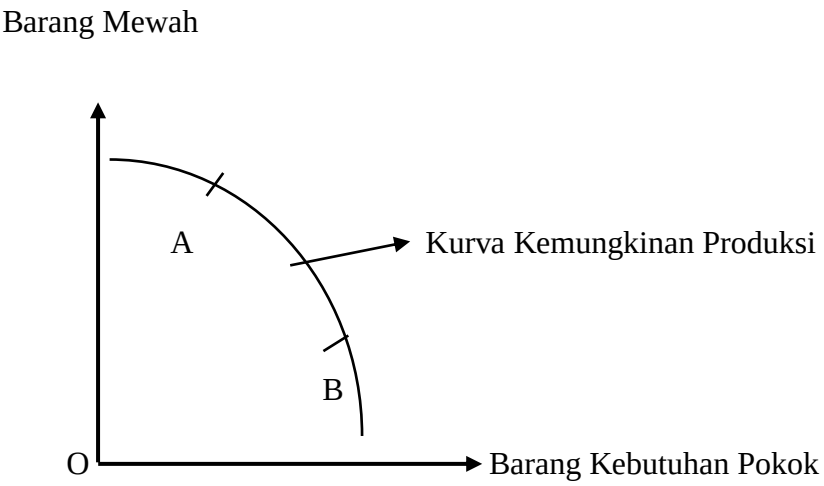

Gambar 2.1

Sumber: Lincoln Arsyad, Ekonomika Pembangunan, 2004

Kurva tersebut meggambarkan kombinasi dari dua macam barang (pokok dan mewah) yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Misalkan titik A dan B menghasilkan pendapatan nasional yang sama. Titik A lebih banyak menghasilkan barang mewah dibandingkan barang pokok. Sedangkan titik B lebih banyak menghasilkan barang pokok daripada barang mewah. Pada negara dengan tingkat pendapatan per kapita rendah, semakin senjang distribusi pendapatan, maka permintaan agregat akan lebih dipengaruhi oleh konsumsi orang – orang kaya. Posisi produksi barang konsumsi berada di titik A, dimana biasanya orang – orang kaya lebih banyak mengkonsumsi barang – barang mewah dibandingkan barang kebutuhan pokok. Pada akhirnya keadaan ini tentu akan menyebabkan kelompok miskin semakin menderita.

Kuznet mengungkapkan bahwa proses awal pertumbuhan ekonomi di negara miskin cenderung menyebabkan terjadinya kemiskinan yang meningkat dan juga membuat ketimpangan dalam pendapatan semakin tidak merata. Kemudian setelah negara tersebut mengalami kemajuan akan membuat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semakin menurun (Kuncoro,2006)

Kuznet mengatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan cenderung membaik. Observasi tersebut kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet "U-Terbalik". Beberapa ekonom berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznets tidak dapat dihindari, namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan di masing-masing negara (Todaro, 2006:253-254).

Hipotesis U-Terbalik Kuznets

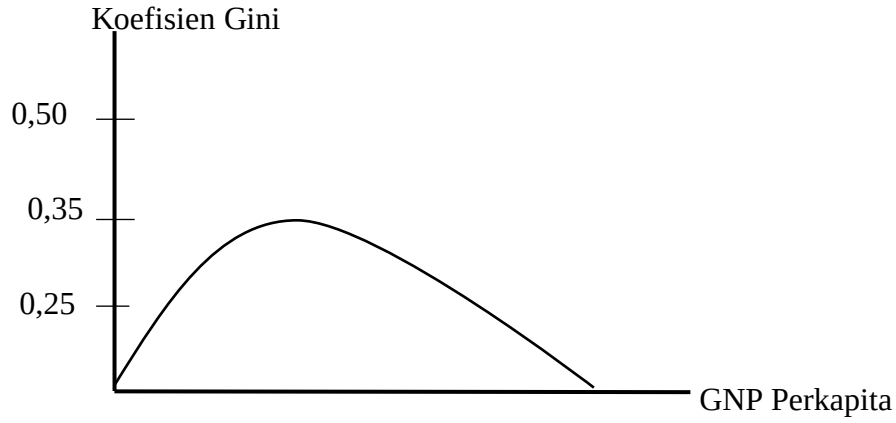

Gambar 2.2

Sumber: Michael P. Todaro, 1994

Terdapat banyak ulasan yang mencoba menjelaskan mengapa pada tahap tahap awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, untuk kemudian membaik. Sebagian besar dari ulasan tersebut mengaitkannya dengan kondisi dasar perubahan struktural. Tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern (dalam model Lewis), lapangan kerja terbatas, namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Kesenjangan pendapatan antar sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya melebar dengan cepat sebelum akhirnya menyempit kembali. Ketimpangan dalam sektor modern yang tengah mengalami pertumbuhan pesat jauh lebih besar daripada yang terkandung dalam sektor tradisional yang relatif stagnan (Michael P. Todaro, 1994).

Kuznet juga mengungkapkan bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan pada tahap awal cenderung semakin meningkat karena adanya perekonomian yang mengalami penurunan yang cukup besar dalam pendistribusian pendapatan, kemudian setelah tahap pembangunan berikutnya ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menurun karena distribusi pendapatan sudah lebih merata. Dalam jangka pendek terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan, namun kemudian dalam jangka Panjang hubungannya adalah negative. Pembangunan anatar daerah ini diakibatkan adanya sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang berbeda di setiap daerah sehingga proses pembangunan di setiap daerah juga

mengalami perbedaan yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar daerah (Hutabarat,2014).

Menurut Sukirno (2006) Distribusi pendapatan terdapat dua yaitu distriusi pendapatan relative yang merupakan perbandingan antara total pendapatan yang sudah diterima oleh sekelompok penerima pendapatan tersebut. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak merupakan presentase masyarakat yang mendapatkan pendapatan yang mencapai pendapatan tertentu ataupun kurang dari padanya. Selain itu pemetaan dalam distribusi pendapatan ada tiga kategori yaitu pembagian distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, pembagian distribusi pendapatan antar daerah desa dan kota, serta pembagian distribusi pendapatan antar wlayah Kabupaten/Kota (Dumairy,1996).

Menurut Arsyad (1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara sedang berkembang (NSB)

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah akan tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi suatu barang dan jasa
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah tertentu
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal capital insentive, sehingga menyebabkan presentase pendapatan modal dari kerja

tambahan besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran akan bertambah

5. Rendahnya mobilitas social di suatu daerah
6. Pelaksanana kebijakan industry substitution impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industry untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar term of trade bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB.
8. Hancurnya industry kerajinan rakyat seperti pertukaran, industry rumah tangga, dan lain-lain.

2.2.6 Indeks Williamson

Menurut Sjafrizal (2008), Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Williamson dalam Heppi Yana Syateri (2005) mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran

penyimpangan pendapatan per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan per kapita nasional. Jadi, Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standard deviasi. Dengan demikian, makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar, dan sebaliknya. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi.

Rumus Indeks Williamson:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Yi - Y)^2 \, fi/n}}{Y}$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

Yi = PDRB per kapita (dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota)

Y = PDRB per kapita (propinsi)

fi = Jumlah penduduk (dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota)

n = Jumlah penduduk (propinsi)

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 – 1 (positif). Semakin besar nilai indeksnya, maka semakin besar juga tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeksnya, maka semakin kecil pula tingkat kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Ketidakmerataan tinggi terjadi pada

nilai indeks diatas 0,50. Sedangkan ketidakmerataan dikatakan rendah apabila nilai indeksnya dibawah 0,50

2.2.7 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz ditemukan oleh seorang ahli statistik asal amerika Bernama Conrad Lorenz Kurva ini tergambar dalam sebuah bujursangkar dimana sisi vertical mewakili presentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili presentase kumulaif penduduk sebagai penerima pendapatan (Suparmoko,2006)

Kurva Lorenz

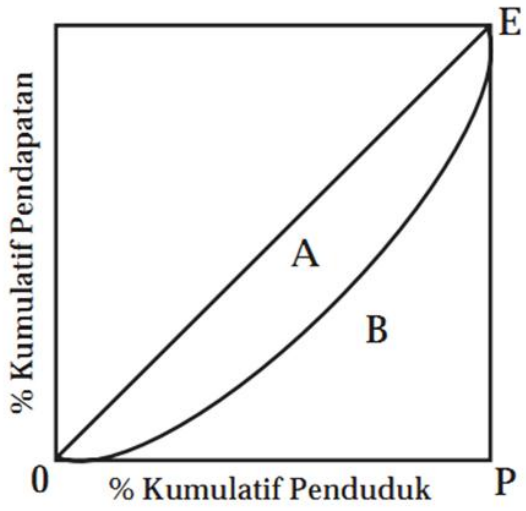

Gambar 2.3

Sumber: (Dumairy, 1996)

Untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan dengan menggunakan Kurva Lorenz, bisa dilihat dari jauh dan dekatnya garis lengkung terhadap garis

diagonal. Semakin dekat garis lengkung dengan garis lurus diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin jauh garis lengkung terhadap diagonal, maka ketimpangan yang terjadi semakin buruk. Cara untuk menggambar kurva Lorenz dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga terbesar.
2. Menentukan desil pertama hingga ke sepuluh pada distribusi data.
3. Menghitung besarnya pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
4. Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing kelompok desil
5. Menghitung presentase kumulatif pendapatan masing-masing desil
6. Memetakan dalam plot 2 dimensi antara tiap-tiap desil sebagai sisi horizontal dan nilai presentase kumulatif pendapatan pada sisi vertical

kurva Lorenz menjelaskan tingkat ketimpangan dengan menampakkan area timpang yang dibentuk oleh garis lurus dan lengkung pada kurva. Sehingga Fluktuasi angka ketimpangan dari waktu ke waktu atupun perbandingan antar tempat sulit untuk dibedakan. Ukuran secara kuantitatif akan diperjelas dengan perhitungan indeks gini.

2.2.8 Indeks Gni

Indeks gini sebagai metode perhitungan yang sering digunakan dalam melihat seberapa besar angka ketimpangan pendapatan yang terjadi (BPS,2013) perhitungan dengan menggunakan indeks gini didapatkan dengan menghitung luas daerah di

antara garis diagonal yang merupakan garis pemerataan sempurna dengan kurva Lorenz dan kemudian di bandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar dimana terdapatnya kurva Lorenz (Arsyad,2010) masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita terendah sampai dengan tertinggi dan kemudian dibentuk golongan golongan setiap 10% mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Selanjutnya dilakukan perhitungan frekuensi presentase dan kumulatif presentase bagi masyarakat yang memperoleh pendapatan maupun pendapatan yang di terima. Angka kisaran dalam menentukan ketimpangan pendapatan dengan menggunkan indeks gini yaitu antara 0 sampai 1. Apabila angka indeks gini yang dihasilkan mendekati angka 0 menunjukan bahwa terjadi pemerataan pendapatan antar masyarakat (pemerataan sempurna) namun apbila anka indeks gini mendekati 1 menandakan bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat semakin timpang (ketimpangan tinggi).

2.2.9 PDRB

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat

pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Lincolin Arsyad, 1999).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan (Robinson Tarigan, 2008), yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yait bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), p erubahan stok, dan ekspor neto.

Produk Domestik Regional Bruto (PDB) yang dalam lingkup provinsi disebut Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara (M. Raharjo, 2011). Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu regional atau provinsi di suatu negara. PDRB sendiri dibagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

1. PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
2. PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung memakai harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (Statistik Indonesia 2013).

2.2.10 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, atau Inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi kenaikan harga makin turun nilai uang. (Kuncoro, 1998:46) kecenderungan dari harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut Inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada barang lainnya.

Case dan fair (2006) menyebutkan bahwa ekspektasi bisa mempengaruhi tingkat harga. Ekspektasi bisa menyebabkan masyarakat takut akan perubahan harga. Jika harga naik dan jika ekspektasi atas dasar perilaku penetapan harga sebelumnya maka perusahaan mungkin akan terus menaikkan harga meskipun permintaan melambat atau menyusut. Jika bank sentral menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang. Para pekerja tidak akan melihat upah riil mereka naik dengan lebih cepat. Padahal ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk masyarakat setiap tahun, dan akibatnya akan memberi para pekerja kenaikkan upah yang lebih kecil (Mankiw,2008).

Menurut Boediono (2006) inflasi adalah kecenderungan dari haga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi dapat terjadi karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi ini

disebut *demand inflation.* Inflasi juga dapat terjadi karena biaya produksi naik atau yan biasa disebut *Cost Inflation.*

Menurut Putong (2002:260), Inflasi dibedakan atas tiga jenis, antara lain:

a. Menurut Sifatnya, Inflasi dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

1) Inflasi rendah yaitu Inflasi yang besarnya kurang dari 10%.
2) Inflasi menengah besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka Inflasi pada kondisi ini biasanya disebut Inflasi dua digit.
3) Inflasi berat yaitu Inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan berubah.
4) Inflasi sangat tinggi yaitu Inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai empat digit (di atas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

b. Inflasi jika dilihat dari penyebabnya yaitu:

Demand Pull Inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (full employment), akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Oleh karena itu, untuk produksi, maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen, yaitu:

pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik (karena tarik-menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

c. Inflasi dibagi menjadi dua jika dilihat dari asalnya, yaitu:

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri, yaitu Inflasi yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran dan belanja negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru.
2) Inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara menjadi mitra dagang suatu negara mengalami Inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya didalam negeri tentu saja bertambah mahal.

2.2.11 Jumlah Penduduk

Menurut Maier (Kuncoro, 1997: 17) di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu:

1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam "kualitas manusia" semakin sulit;
2) Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian Karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya;
3) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

Menurut Arsyad, (2004) tedapat tiga ciri-ciri pokok yang menjadi tanda-tanda perkembngan serta permasalahan yang terjadi didalam kependudukan Indonesia, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan, penyebaran penduduk yang kurang seiimbang antar daerah dan yang terakhir adalah kualitas hidup penduduk yang sangat perlu ditingkatkan.

Menurut Sukirno (1997) perkembangan jumlah penduduk merupakan faktor yang dapat mendorong dan menghambat di dalam pembangunan. Dapat dikatakan

sebagai faktor pendorong karena adanya kemungkinan semakin banyaknya tenaga kerja yang dihasilkan, lalu terjadinya perluasan pasar dimana terjadi perluasan pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting diantaranya yaitu, pendapatan masyarakat dan juga jumlah penduduk. Dan penduduk bisa disebut sebagai faktor penghambat pembangunan dikarenakan akan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan didalam hidupnya.

2.3 Pengaruh Variabel PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan

2.3.1 Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan Pendapatan

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indicator keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah atau daerah (Sukmaraga,2011). Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengauh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suau wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro dan Mudrajat 2004)

Oleh karena itu, besarnya PDRB masing-masing daerah tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, tergantung pada kemampuan dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan seluruh nilai tambah yang diperoleh keseluruhan unit usaha dala suatu daerah ataupun penjumlahan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh keseluruhan unit ekonomi di suatu daerah. PDRB perkapita didapat dengan cara membagi PDRB dengan jumalh penduduk. Dengan demikian semakin tinggi PDRB suatu daerah maka akan semakin rendah ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Penelitian Fazar Nuriansyah dan kusnaedi (2011) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh negative terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

2.3.2 Pengaruh Inflasi terhadap ketimpangan pendapatan

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Boediono,2002) Inflasi sebagai suatu gejala ekonomi memiliki dampak bagi kegiatan perekonomian masyarakat sebagai konsumen juga berpengaruh kepada perusahaan sebagai produsen. Misalnya pada konsumen, inflasi menyebabkan harga-harga barang yang dikonsumsi mengalami kenaikan, sehingga pola konsumsi masyarakat akan berubah, sedangkan pada produsen, inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga bahan baku sehingga dapat mengurangi kemampuan produsen untuk membeli bahan baku yang akhirnya dapat menurunkan produksi. Implasi juga berdampak pada kegiatan pendistribusian pendapat menjadi tergangu

karena orang yang memiliki penghasilan tetap secara rill pendapatannya akan mengalami penurunan. Dengan kata lain semakin tinggi inflasi maka ketimpangan distribusi pendapatan juga akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapatan Rubens (2005) yang menyebutkan bahwa meningkatnya inflasi dapat menyebabkan kemerosotan terhadap distribusi pendapatan. Penelitian Ulfie Efriza (2014) membuktikan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan.

2.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan

Menurut Sukirno, (2007) perkembangan jumlah penduduk merupakan faktor yang dapat mendorong dan menghambat didalam pembangunan. Dapat dikatakan sebagai faktor pendorong karena adanya kemungkinan semakin banyak tenaga kerja yang dihasilkan, lalu terjadinya perluasan pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua fakor penting diantaranya yaitu, pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Dan penduduk bisa disebu sebagai faktor penghambat pembangunan dikarenakan akan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan didalam hidupnya.

Menurut Arsyad, (2004) terdapat tiga ciri-ciri pokok yang menjadi tanda-tanda perkembangan serta permasalahan yang terjadi didalam kependudukan Indonesia, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan, penyebaran penduduk yang kurang seimbang antar daerah dan yang terakhir adalah

kualitas hidup penduduk yang sangat perlu ditingkatkan. Jumlah penduduk di jawa tengah setiap tahunnya mengalami kenaikkan tentu saja hal ini akan berdampak pada ketimpangan pendapatan, Karena mayoritas angka tingkat kelahiran berasal dari penduduk miskin, yang mana mereka belum tentu bisa memberikan Pendidikan serta kualitas hidup yang lebih baik dari orang tuanya, tidak hanya dari angka kelahiran, betambahnya jumlah penduduk juga bisa disebabkan oleh proses migrasi. Kegaiatan ini tentu akan menambah jumlah penduduk, dan para imigran belum tentu mereka membawa kemampuan atau keahlian untuk bisa berkembang di tempat yang dia tuju, pertumbuhan penduduk sangat erat dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki dalam aspek dan komponen demografi seperti migrasi, fertilasi, dan mortalitas akan membantu dalam pengambilan kebijakan dan perencanana program untuk dapat mengembangkan program pembangunan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.4 Kerangka Pemikiran

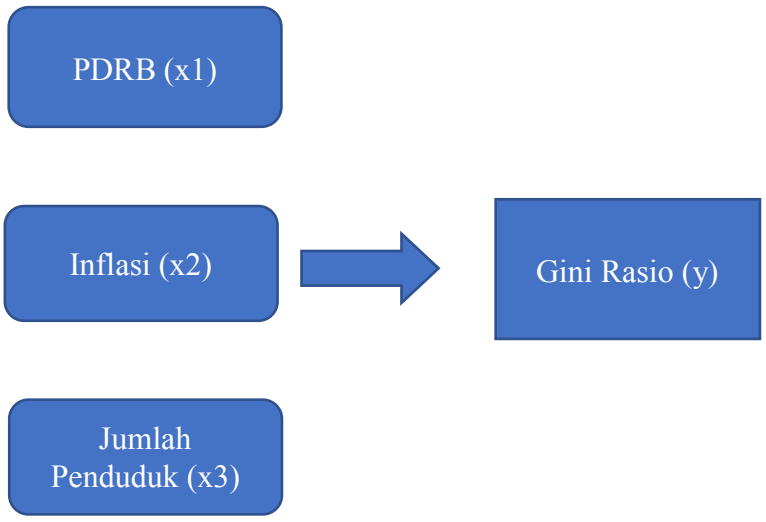

2.3.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga PDRB Perkapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017
2. Diduga Inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017
3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017

BAB III

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud dalam kumpulan angka-angka. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain, data tersebut dapat diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

Data sekunder disini menggunakan metode *Panel Data* atau Data Panel yakni gabungan antara data antar tempat atau ruang (*cross section)* dan data antar waktu *(Time Series)*. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu dan tempat tertentu dari sampel. Adapun data *time series* yang digunakan adalah data tahunan yaitu tahun 2010-2016 serta data *cross section* sebanyak 35 kabupaten/kota yang menunjukkan jumlah kabupaten di Daerah Jawa Tengah.

Pengumpulan data sekunder dari penelitian ini bersumber dari:

1. Badan Pusat Statisik Provinsi Jawa Tengah
2. Studi pustaka yaitu dengan mempelajari teori dari buku-buku dengan melakukan analisis yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel Dependen yang merupakan variabel tergantung, variabel ini dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya. Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data Gini Rasio di Jawa Tengah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Produk domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Jawa Tengah 2010-2017.
2. Data Inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017.
3. Data Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah analisis dan memperjelas variabel – variabel yang ada dalam penelitian ini maka dilakukan variabel operasional sebagai berikut:

1. Gini Ratio (Y) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan pendapatan penduduk disuatu wilayah tersebut. Data yang digunakan adalah pendapatan penduduk 35 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 – 2017 diperoleh dari halaman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

2. PDRB atas dasar harga Konstant (X1) menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Data yang digunakan mulai dari tahun 2010-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Tengah.
3. Inflasi (X2) Inflasi adalah kejadian apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjnag Data yang digunakan mulai dari tahun 2010-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Tengah.
4. Jumlah Penduduk (X3) adalah kumpulan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonomi seperti produsen dengan konsumen. Data yang digunakan mulai dari tahun 2010-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Metode Analisis

Dalam Penelitian ini digunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel regresi data panel merupakan Teknik regresi yang menggabungkan data time series dengan cross section. Metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data time series atau cross section yaitu: (Widarjono,2007).

1. Data panel yang merupakan dua data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar.

2. Menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasai masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted-variabel).

Data panel juga memiliki beberapa kelemahan yang diantaranya sebagai berikut: (Widarjono,2007)

1. Pada metode common effect Teknik yang digunakan hanya dengan mengkombinasi data *time series* dan *cross section.* Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel Dalam pendekatan ini tidak memperlihatkan dimensi maupun waktu. Dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data anta perusahaan sama dalam berbagai rentan waktu asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteistik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.
2. Pada metode Fixed Effect Teknik yang digunakan adalah metode variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan namun sama antar waktu *(time invariant).* Namun metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya drajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.
3. Pada metode *Random Effect* Teknik yang digunakan adalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error term*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar kabupaten/kota Teknik OLS tidak dapat digunakan untuk

mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan Metode *Generalized Least Square* (GLS)

3.4.1 Model Regresi Data Panel

$$Yit = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_3 X_{4it} + U_{it}$$

Keterangan:

Y = Prosentase angkatan kerja yang terserap

β0 = Koefisien intersep

β1 = Koefisien pengaruh PDRB

β2 = Koefisien pengaruh Inflasi

β3 = Koefisien pengaruh Jumlah Penduduk

I = Provinsi Jawa Tengah

t = Waktu (tahun 2010-2017)

Ut = Variabel pengganggu

Adapun tiga model pendekatan atau langkah-langkah dalam melakukan regresi adalah sebagai berikut:

1. ***Common Effect Models*** **(CEM)**

Merupakan pendekatan yang paling sederhana yang disebut CEM atau *pooled least square*, dimana pada model ini maka diasumsikan intersep masing – masing koefisien adalah sama, begitu pula slope koefisien pada data *cross section* dan *time series*nya. Berdasarkan asumsi tersebut maka persamaan model Cem dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Yit = \alpha + \beta\ Xit + uit$$

2. *Fixed Effect Models* (FEM)

Merupakan pendekatan dimana merupakan salah satu cara untuk memperhatikan unit cross section pada model regresi data panel adalah dengan memperoleh nilai intersep yang berbeda – beda pada setiap unit cross section tetapi masih mengasumsikan slope koefisien yang tetap. Maka persamaan model FEM adalah sebagai berikut:

$$Yit = \alpha i + \beta\ Xit + uit$$

3. *Random Effect Models* (REM)

Pada model REM, diasumsikan αi merupakan variabel random dengan mean α0, sehingga intersep dapat diasumsikan sebagai α1 = αi+ ei, dimana ei merupakan error random yang mempunyai mean 0 dan varians ei tidak secara langsung diobservasiatau disebut juga variabel laten. Persamaan model REM adalah sebagai berikut:

$$Yit = \alpha 0 + \beta\ Xit + wt$$

Dalam menentukan estimasi model regresi data panel dilakukan beberapa uji untuk memilih metode pendekatan estimasi yang sesuai dan menghasilkan regresi yang baik. Langkah – langkah yang dilakukan untuk memperoleh model yang tepat pertama dilakukan adalah dengan melakukan regresi dengan menggunakan regresi dengan model CEM dan FEM yang kemudian melakukan test dengan menggunakan

uji Chow sehingga didapatkan hasil regresi yang baik dari kedua model tersebut. Apabila yang baik adalah FEM maka akan dilakukan test kembali dengan menggunakan uji Hausmen untuk menentukan model yang tepat adalah model FEM atau REM.

3.4.2 Uji Pemilihan model Regresi

1. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model common effect dengan model fixed effect dengan uji hipotesis sebagai berikut:

Pemilihan estmasi *common effect* atau estimasi *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan melihat *cross-section Chi-square* apabila *cross-section Chi-square* > *P-value* maka signifikan dan model yang digunakan adalah *common effect*. Sedangkan apabila *cross-section Chi square* < *P-value* maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model estimasi *fixed effect* dan *random effect*. Untuk melakukan *uji Hausman* maka dapat melihat dari nilai *P-value*. Apabila *p-value* signifikan (≤ 5%) maka model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*. Sebaliknya bila *p-value* tidak signifikan (≥ 5%), maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effect.*

3.4.3 Uji Statistik

1. Uji Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. rumus R^2 adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \text{ESS/TSS}$$

Jika garis regresi tepat pada semua data Y, maka ESS sama dengan TSS sehingga R^2 = 1, sedangkan jika garis regresi tepat pada nilai rata-rata Y maka ESS = 0 sehingga R^2 = 0. Nilai R^2 berkisar antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebasnya dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebasnya memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono, 2009: 69). Hipotesis yang digunakan:

H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai f hitung < f tabel

H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai f hitumg > f tabel

Nilai f hitung dapat dibandingkan dengan melihat nilai f tabel, jika f hitung > f tabel maka menolak H0 maka variabel independent secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai f hitung < f table maka variabel independent secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t statistik)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengkaji pengaruh variable independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut:

a. Variabel PDRB

HO: t hitung < t tabel, yaitu tidak terjadi pengaruh signifikan variabel PDRB terhadap variabel Y (dependen)

H1: t hitung > t tabel, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel PDRB variabel terhadap variabel Y (dependen)

b. Variabel Inflasi

HO: t hitung < t tabel, yaitu tidak terjadi pengaruh signifikan variabel Infasi terhadap variabel Y (dependen)

H1: t hitung > t tabel, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel Inflasi variabel terhadap variabel Y (dependen)

c. Variabel Jumlah Penduduk

HO: t hitung < t tabel, yaitu tidak terjadi pengaruh signifikan variabel Jumlah Penduduk terhadap variabel Y (dependen)

H1: t hitung > t tabel, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel Jumlah Penduduk variabel terhadap variabel Y (dependen)

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t kritis, maka H0 ditolak maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung < t kritis maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen (Widarjono,2009:69).

IV

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dengan variabel dependen Indeks Gini dalam satuan persen, variabel independen berupa data sekunder yaitu PDRB (ADHK) dalam juta rupiah, Inflasi dalam satuan persen, Jumlah Penduduk dalam satuan jiwa. Penelitian dilakukan di 29 Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 hingga 2017. Dalam menganalisis dan mengolah data penelitian menggunakan bantuan software *E-views* 8. Adapun model regresi menggunakan data panel. Analisis hasil regresi ini menjelaskan model regresi dan uji sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk model yang terbaik sehingga mampu menjelaskan permasalahan yang hendak dijawab dan sesuai tujuan penelitian.

4.2 Pemilihan Model

4.2.1 Uji Chow Test

Uji chow dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara *common effect model* dengan *fixed effect model* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut:

Ho: memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*.

Ha: memilih menggunakan model estimasi *Fixed effect*.

Tabel 4.1

Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.544482	(28,200)	0.0000
Cross-section Chi-square	210.362810	28	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian uji chow diperoleh angka probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0.0000 yang artinya nilai p value lebih kecil daripada α 5%, sehingga kesimpulan dari uji chow adalah menolak Ho, sehingga lebih baik menggunakan model Fixed *Effect*.

4..2.2 Uji Hausman Test

Uji Hausman Test digunakan untuk memilih model terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model* dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho: memilih menggunakan model estimasi *Random effect.*

Ha: memilih menggunakan model estimasi *Fixed effect*.

Tabel 4.2

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	58.770068	3	0.0000

Pada tabel diatas hasil regresi dengan menggunakan *eviews 8* maka didapatkan nilai hasil probabilitas = 0.0000, yang berarti probabilitas = 0.0000 < α = 5%, kesimpulan dari *uji hausman* adalah menolak Ho sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect.*

4.2.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Tabel 4.3
Fixed Effect

Dependent Variable: IG?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/01/18 Time: 15:55
Sample: 2010 2017
Included observations: 8
Cross-sections included: 29
Total pool (balanced) observations: 232

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.209109	0.016701	12.52105	0.0000
PDRB?	1.68E-09	7.47E-10	2.251430	0.0254
INFLASI?	-0.000756	0.000832	-0.908932	0.3645
JP?	8.64E-08	9.85E-09	8.774214	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_CILACAP--C	-0.154005			
_BANYUMAS--C	-0.029796			
_PURBALINGGA--C	-0.000267			
_BANJARNEGARA—C	0.048960			
_KEBUMEN—C	-0.025033			
_PURWOREJO--C	0.067730			
_WONOSOBO--C	0.052931			
_MAGELANG--C	-0.009453			
_BOYOLALI—C	0.027468			
_KLATEN—C	-0.001655			
_SUKOHARJO--C	0.030277			
_WONOGIRI—C	0.019802			
_KARANGANYAR—C	0.043764			
_SRAGEN—C	0.026682			
_GROBOGAN--C	0.009526			
_BLORA—C	0.038065			
_REMBANG—C	0.047654			
_PATI—C	0.024031			
_KUDUS—C	-0.065351			
_JEPARA—C	-0.037750			
_DEMAK—C	0.020254			
_SEMARANG--C	-0.012276			
_TEMANGGUNG—C	0.033933			
_KENDAL—C	-0.005878			
_BATANG—C	0.069470			
_PEKALONGAN—C	0.031158			
_PEMALANG--C	-0.049917			
_TEGAL—C	-0.067772			
_BREBES—C	-0.132553			

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.619344	Mean dependent var	0.324397
Adjusted R-squared	0.560342	S.D. dependent var	0.040725
S.E. of regression	0.027003	Akaike info criterion	-4.258276
Sum squared resid	0.145835	Schwarz criterion	-3.782864
Log likelihood	525.9600	Hannan-Quinn criter.	-4.066547
F-statistic	10.49705	Durbin-Watson stat	1.567487
Prob(F-statistic)	0.000000		

Gini Ratio = 0.209109(%) + PDRB 0.0000000001.68 (Juta) – 0.000756 Inflasi (%) + JP 0.00000008.64 (Jiwa) + e

Dari tabel fixed effect terlihat bahwa nilai koefisien konstanta regresi didapat sebesar 0.209109 yang menunjukkan bahwa variabel PDRB (ADHK), Inflasi, Jumlah Penduduk, berpengaruh positif serta dapat meningkatkan Ketimpangan Pendapatan. Dan dilihat dari koefisien variabel independen sebagai berikut:

a. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien untuk variabel PDRB(ADHK) berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah yang berarti ketika terjadi peningkatan sebesar 1 juta PDRB maka akan menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.000000000168 %
b. Hasil regresi menunjukan bahwa nilai koefisien untuk varabel inflasi sebesar-0.000756 persen. Dengan probabilitas 0.0254 lebih besar dari alpa. Hal ini menunjukan bahwa hubungan yang tidak signifikan dan berpengaruh negativ artinya inflasi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan.
c. Ketika angka Jumlah Penduduk meningkat sebanyak 1 jiwa maka akan menaikkan Ketimpangan Pendapatan sebesar 0.0000000864 persen. Sehingga, ketika semakin meningkatnya Jumlah Penduduk maka akan meningkatkan pula Ketimpangan Pendapatan.

4.2.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat. Dari hasil regresi pengaruh PDRB(ADHK), Inflasi, Jumlah Penduduk, terhadap Gini Ratio di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2017 dengan estimasi *fixed effect,* diperoleh nilai R^2 sebesar 0.619344 atau sebesar 61%. Hal ini membuktikan bahwa variasi variabel PDRB (ADHK), Jumlah Penduduk, dapat dijelaskan oleh variabel tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 38.7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.2.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak berpengaruh. Dari hasil regresi didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.000000 < α = 5%, artinya signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

4.2.6 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Dengan membandingkan probabilitas t dengan nilai alpha 0,05 maka dapat diketahui apakah menolak atau menerima hipotesis.

Tabel 4.4

Hasil Regresi Pengujian Hipotesis

Variabel	t -Statistik	Prob.	Keterangan
X1	2.251430	0.0254	Signifikan
X2	-0.908932	0.3645	Tidak Signifikan
X3	8.774214	0.0000	Signifikan

Sumber: *eviews 8*

Berdasarkan uji *Fixed effect* yang telah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa:

a. X1 (PDRB)

Dari hasil uji signifikansi variabel PDRB (ADHK) didapatkan probabilitas sebesar 0.0254 lebih kecil dari alpa (0.0254 < 0.05) = 5%) dengan nilai koefisien 0.00000000168 maka dapat dinyatakan PDRB signifikan dan positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2017. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan PDRB (ADHK) berpengaruh negative terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai.

b. X2 (Inflasi)

Hasil perhitungan pada model fixed effect, variabel Inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3645 lebih besar dari alpa (0.3645> 0,05), dengan nilai koefisien – 0.000756 maka dapat dinyatakan Inflasi tidak signifikan dan negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010

– 2017. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan Inflasi berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai.

c. X3 (Jumlah Penduduk)

Dari hasil uji signifikansi Variabel Jumlah Penduduk didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpa (0.0000 < α = 5%) dengan nilai koefisien sebesar 0.0000000864 berarti berpengaruh signifikan positif terhadap Gini Ratio di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah sesuai.

4.3 Analisis Ekonomi

Berikut dapat dijelaskan analisis dengan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dimana daerah yang menduduki Ketimpangan Pendapatan yang menjadi data perhitungan tertinggi dan terendah.

Tabel 4.5

Intersept antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten	C	Koefisien
CILACAP	0.209109	0.055104
BANYUMAS	0.209109	0.179313
PURBALINGGA	0.209109	0.208842
BANJARNEGARA	0.209109	0.258069
KEBUMEN	0.209109	0.184076
PURWOREJO	0.209109	0.276839
WONOSOBO	0.209109	0.26204
MAGELANG	0.209109	0.199656
BOYOLALI	0.209109	0.236577
KLATEN	0.209109	0.207454
SUKOHARJO	0.209109	0.239386
WONOGIRI	0.209109	0.228911

KARANGANYAR	0.209109	0.252873
SRAGEN	0.209109	0.235791
GROBOGAN	0.209109	0.218635
BLORA	0.209109	0.247174
REMBANG	0.209109	0.256763
PATI	0.209109	0.23314
KUDUS	0.209109	0.143758
JEPARA	0.209109	0.171359
DEMAK	0.209109	0.229363
SEMARANG	0.209109	0.196833
TEMANGGUNG	0.209109	0.243042
KENDAL	0.209109	0.203231
BATANG	0.209109	0.278579
PEKALONGAN	0.209109	0.240267
PEMALANG	0.209109	0.159192
TEGAL	0.209109	0.141337
BREBES	0.209109	0.076556

Sumber: *eviews 8*

Dari Tabel diatas dapat diketahui manakah Daerah yang memiliki ketimpangan pendapatan paling tinggi dan terendah. Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten yang memiliki ketimpangan pendapatan paling tinggi dengan nilai intersep sebesar 0.276839, hal ini terjadi karena minimnya Pendapatan Asli Daerah di Purworejo menyebabkan purworejo belum bisa mandiri secara ekonomi, tentunya hal ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kabupaten Purworejo masih berusaha menggenjot PAD dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada, contohnya seperti Sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor wisata, ekonomi kreatif, pajak dan optimalisasi BUMD yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat (Rohman, 2016). Sedangkan Kabupaten Cilacap adalah kabupaten yang memilki nilai ketimpangan paling rendah dengan nilai intersep sebesar 0.055104. Hal ini terjadi karena peningkat Jumlah nilai PAD yang terjadi setiap tahunnya, perolehan

PAD itu didapat melalui potensi daerah cilacap yang di unggulkan, contohnya seperti sektor pertanian, sektor pertambangan meliputi tambang batu bara, emas, bentonite, trass, andesit, batu kapur, pasir besi dan tambang lainnya meskipun potensi tersebut belum tergarap dengan maksimal dan belum dilakukan uji kelayakan namun beberapa tambang sudah bisa diperkirakan besaran potensinya seperti batu bara, potensi kandungan emas yang ada di majenang mencapai 4-7 gram per ton dan beberapa potensi lainnya, Cilacap juga merupakan daerah yang ketempatan industry hilir migas terbesar dan terlengkap di Indonesia Industri ini mampu mengolah minyak mentah dengan kapasitas 348.000 barel perhari. Maka potensi daerah yang ada di Cilacap akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya (Tasniatun, 2016).

4.3.1 Analisis Pengaruh PDRB (ADHK) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil estimasi *Fixed Effect* yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa PDRB (ADHK) berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hasil perolehan nilai koefisien dari PDRB (ADHK) itu sebesar 0.00000000168 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar 0.0254 yang menandakan bahwa ketika PDRB (ADHK) naik sebesar 1 juta maka akan mampu menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.00000000168 % hipotesis ini sesuai dengan teori kuznet yang menyatakan bahwa dalam jangka Pendek antara PDRB terhadap ketimpangan pendapatan terdapat hubungan yang positif.

4.3.2 Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil estimasi *Fixed Effect* yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil perolehan nilai koefisien dari variabel Inflasi itu sebesar -0.000756 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar 0.3645 lebih besar dari alpa (0.3645 >0.05) yang menandakan bahwa sedang terjadi inflasi tinggi atau rendah itu tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena inflasi yang ada di Jawa Tengah tergolong rendah pada periode 2010-2017. Pemerintah Jawa Tengah mampu menjaga stabilitas harga dengan baik, bahkan inflasi thn 2015 hanya sebesar 2.731 persen itu terbaik di Jawa (Deputi kepala BI Jateng, 2016). Maka inflasi tahun 2010-2017 tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah.

4.3.3 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah

Pada hasil regresi didapatkan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif antara jumlah penduduk dengan ketimpangan pendapatan. Hasil perolehan nilai koefisien dari Jumlah Penduduk itu sebesar 0.0000000864 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar 0.0000 yang menandakan bahwa ketika Jumlah Penduduk naik sebesar 1 jiwa maka akan mampu menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.0000000864%

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dengan melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, adapun variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB (ADHK), inflasi, dan umlah penduduk, sedangkan variabel dependen nya adalah ketimpangan pendapatan yang diukur dengan menggunakan variabel Indeks Gini antar kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengan tahun 2010-2017. Adapun hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisi regresi data panel dengan menggunakan model fxed effect. Adapun hasil yang diperoleh dalam uji koefisien determinasi (R^2) adalah variabel independent yang terdiri dari PDRB (ADHK), inflasi, dan jumlah penduduk memperoleh hasil sebesar 0.619344 atau sebesar 61.93% adapun sisanya yaitu sebesar 38.07% dijelaskan oleh variabel lain diluar diluar model ini.
2. Hubungan variabel PDRB(ADHK) dengan ketimpangan pendapatan didapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/ di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan selama ini PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang dalam peningkatannya berdampak pada kenaikan ketimpangan pendapatan. Hasil

3. koefisien yang didapat yaitu sebesar 0.00000000756 yang menandakan bahwa apabila PDRB (ADHK) naik sebesar 1 juta maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.00000000756 persen. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang mana PDRB (ADHK) berpengaruh negative.
3. Hubungan variabel inflasi dengan ketimpangan pendapatan didapatkan hasil bahwa inflasi berpengaruh negativ tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Hasil koefisien yang didapat yaitu sebesar -0.000756 yang menandakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap naik dan turunnya ketimpangan pendapatan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang mana inflasi berpengaruh positiv.
4. Hubungan variabel jumlah penduduk dengan ketimpangan pendapatan didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positive signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Hasil koefisien yang didapat yaitu sebesar 0.0000000864 yang menandakan bahwa apabila jumlah penduduk naik sebesar 1 juta maka akan mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.0000000864 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang mana Jumlah Penduduk berpengaruh positiv.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh PDRB(ADHK), Inflasi Jumlah Penduduk terhadap ketimpanagan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2017 terdapat beberapa Implikasi yaitu:

1. Pemerataan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan pada seluruh golongan masyarakat menjadi tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi. Hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat kesenjangan pendapatan merupakan permasalahan yang serius yang dihadapai oleh setiap daerah. Pembangunan yang ada bukan hanya pembangunan daerah yang bersifat terpusat namun juga yang dapat menjangkau daerah – daerah terpencil yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga roda perekonomian dapat bergerak seimbang di setiap Kabupaten/Kotanya.
2. Pemerintah harus mempunyai regulasi yang mengatur jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan kualitas penduduk. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan yang ada seiring untuk menciptakan penduduk yang berkualitas terutama lapangan pekerjaan padat karya. Dimana hal tersebut dapat melatih kemampuan dan keahlian bagi penduduk non-produktif. Sehingga para penduduk non-produktif dapat memiliki pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasakan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (1999), Ekonomi pembangunan. STIE YKPN, Yogyakarta.

Albanesi (2007), Hubungan antara inflasi , dengan ketimpangan. Jurnal ekonomi moneter 1-27.

Ananda, Pulungan (2016), Inflasi Jateng Terendah di Pulau Jawa, Diambil 14 Agustus 2018, dari http://ekonomi.kompas.com/read/2 .

Ani, Nulaili (2016), "Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi ketimpangan distibusi pendapatan di pulau jawa tahun 2007-2013". Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Aditya, Pramulyawan (2010), "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2001-2008". Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Boediono (1994), Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE, Yogyakarta.

Nugroho Budi Satrio (2014), "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2011". Journal of economic and policy Received: 18 Oktober 2013; Accepted: 11 November 2013; Published: Maret 2014.

Fair, Case (2006), Prinsip-Prinsip Ekonomi, Erlangga: Jakarta.

Dumairy (1999), Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Erlangga.

Munandar, Haris dkk (2007), "Mencari hubungan antara Kebijakan Moneter dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, Kajian Menggunakan data Regional Indonesia", JEL, Klasifikasi E58, E61, 132, D23, 53.

Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan pembangunan daerah Jakarta: Penerbit Erlangga, Jakarta.

Putra, Linggar Dewata (2011), "Analisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi jawa tengah periode 2000-2007". Skripsi Sarjana a Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Mubyarto (1995), Pengantar Ekonomi Peranian. Jakarta: LP3ES.

Mukti, Ali (2016), PAD masih minim Purworejo belum bisa mandiri secara ekonomi Diambil 10 Agustus 2018, dari Purworejo.sorot.co/berita-6647-pad-r.

Raswita, Ngakan Putu Mahesa Eka dan Utama Made Suyana (2013), "Analisis petumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar". Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Purman, Ray Tarsil (2017), "Analisis Ketimpangan Pendpatan di Provinsi Jawa Barat". Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

Putong (2002), Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Raharjo, Budi (2011), Belajar otodidak membuat database menggunakan MySQL. Informatika Bandung.

Sadono, Sukirno Nomor (1985), Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika.

Sukamaraga P (2011), "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB perkapita dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah" Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Sjafrizal (1997), Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Jakarta, Jurnal Buletin Prisma.

Suparmoko (2002), Ekonomi Publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. Andi. Yogyakarta.

Sukirno, Sadono (1997), Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Todaro Michael P (1994), Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta, Erlangga.

Tarigan R (2004), Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara, Jakarta.

Tambunan, Tulus TH. (2001), Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tasniatun (2015), Potensi Daerah Cilacap, Diambil 11 Agustus 2018, darihttp://www.google.com/amp/s/tasr.

Widarjono, A. (2007), Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Ekonisia FE UII, Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran I

Data Penelitian

DATA KABUPATEN/ KOTA JAWA TENGAH					
Tahun	**Kabpaten**	**Indeks Gini**	**PDRB**	**Inflasi**	**Jumlah Penduduk**
2010	Cilacap	0.25	75099089.89	5.65	820740
2011		0.3	78156818.82	5.27	1655668
2012		0.32	79702237.61	6.87	1666192
2013		0.37	81022670.26	8.37	1676098
2014		0.34	83391500.18	8.19	1685631
2015		0.34	88347606.68	2.63	1694726
2016		0.34	92820362.2	2.77	1703390
2017		0.37	95103846.69	4.41	1711627
2010	Banyumas	0.34	23016943.39	6.04	779297
2011		0.35	24538595.63	3.4	1574002
2012		0.34	25982158.22	4.73	1589930
2013		0.36	27793138.47	8.5	1605585
2014		0.32	29397687.4	7.09	1620772
2015		0.32	31164876.4	2.52	1635909
2016		0.32	33051046.65	2.42	1650625
2017		0.36	35147313.3	3.91	166502
2010	Purbalingga	0.24	10858631.52	7.82	430402
2011		0.28	11474221.22	4.47	860725
2012		0.33	12138445.34	4.09	870423
2013		0.32	12778311.23	9.57	879880
2014		0.3	13397712.78	9.08	889172
2015		0.3	14125812.26	1.62	898376
2016		0.3	14796924.63	2.39	907507
2017		0.32	15564284.43	3.72	916427
2010	Banjarnegara	0.26	9439.359	7.13	434336
2011		0.36	9952403.66	4.73	877201
2012		0.33	10473363.43	4.55	883710
2013		0.39	11043083.01	8.35	889894
2014		0.34	11629845.85	7.78	896038

2015		0.34	12266046.35	2.97	901826
2016		0.34	12929657.38	2.87	907410
2017		0.39	13630385.44	3.67	916427
2010	Kebumen	0.23	12311421.83	8.36	583246
2011		0.34	13068985.5	4.52	1166989
2012		0.35	13707057.24	4.64	1171998
2013		0.31	14333333.5	10.46	1176622
2014		0.28	15163091.84	7.36	1180894
2015		0.28	16115554.01	2.91	1184882
2016		0.28	16916219.56	2.71	1188603
2017		0.31	17743915.15	3.25	912917
2010	Purwerejo	0.29	8513490.56	7.56	353037
2011		0.36	8993814.3	2.52	699682
2012		0.31	9406242.93	3.66	702678
2013		0.34	9870969.95	7.14	705527
2014		0.38	10312937.79	8.48	708006
2015		0.38	10866645.98	3.45	710386
2016		0.38	11426355.14	2.66	712686
2017		0.34	12005095.39	4.29	714574
2010	Wonosobo	0.25	9005925.54	6.06	372760
2011		0.35	9489550.46	2.66	760828
2012		0.38	9935905.32	3.84	765113
2013		0.34	10333757.05	8.82	769396
2014		0.35	10828168.68	8.44	773391
2015		0.35	11353869.94	2.71	777122
2016		0.35	11949926.14	2.97	780793
2017		0.34	12292804.84	3.21	784207
2010	Magelang	0.25	14363230.57	8.25	589907
2011		0.32	15323039.48	2.64	1196895
2012		0.33	16071142.55	2.59	1209486
2013		0.34	17020755.61	8.34	1221673
2014		0.34	17936288.38	7.91	1233701
2015		0.34	18838351.97	3.6	1245496
2016		0.34	19855844.24	2.86	1257123
2017		0.34	20882801.03	3.47	1268396

2010	Boyolali	0.27	13721701.47	7.34	473200
2011		0.36	14592026.26	3.35	939020
2012		0.38	15369974.36	3.45	945511
2013		0.4	16266498.68	8.21	951809
2014		0.3	17148350.76	7.45	957913
2015		0.3	18160983.95	2.58	963690
2016		0.3	19118756.3	2.65	969325
2017		0.4	20188699.71	3.08	974579
2010	Klaten	0.25	17002049.66	7.9	576274
2011		0.32	18071350.51	1.67	1137973
2012		0.33	19102402.71	3.65	1143676
2013		0.34	20241429.01	7.92	1149002
2014		0.36	21424522.36	7.76	1154028
2015		0.36	22558976.15	2.57	1158795
2016		0.36	23717931.02	2.31	1163218
2017		0.34	24920302.86	3.12	1167401
2010	Sukoharjo	0.3	16357221.65	6.67	416595
2011		0.33	17319638.62	2.63	833915
2012		0.35	18342247.26	4.22	841773
2013		0.34	19401889.44	8.42	849392
2014		0.35	20449009.84	7.93	856861
2015		0.35	21612078.19	2.69	864207
2016		0.35	22836644.07	2.34	871397
2017		0.34	24152939.48	3.4	878374
2010	Wonogiri	0.29	13310571.1	6.66	478114
2011		0.35	13786711.34	3	934616
2012		0.32	14605088.22	3.43	938704
2013		0.34	15303280.47	8.6	942430
2014		0.33	16107795.17	7.2	945682
2015		0.33	16977198.56	2.13	949017
2016		0.33	17862651.97	2.94	951975
2017		0.34	18788397.76	2.32	954706
2010	Karanganyar	0.29	16393788.72	7.26	411812
2011		0.37	17205063.88	3.31	823511
2012		0.4	18219456.66	3.29	831891
2013		0.33	19256516.28	8.7	840199

2014		0.36	20262444.42	7.38	848326
2015		0.36	21286287.14	2.4	856198
2016		0.37	22428803.8	1.93	864021
2017		0.33	23665952.05	3.15	871596
2010	Sragen	0.28	15832557.66	6.77	438365
2011		0.35	16870231.27	2.86	863977
2012		0.37	17902104.86	3.74	868090
2013		0.35	19102181.74	7.55	871991
2014		0.33	20169824.79	8.51	875615
2015		0.33	21390871.2	3.05	879027
2016		0.33	22614621.66	2.49	882090
2017		0.35	23933252.17	3.18	885122
2010	Grobogan	0.28	12766021.74	7.45	662539
2011		0.37	13172711.96	1.86	1319822
2012		0.4	13842047.14	4.48	1328183
2013		0.33	14474728.93	7.88	1336317
2014		0.36	15064456.66	8.03	1343985
2015		0.36	15962619.43	3.31	1351429
2016		0.36	16674629.7	2.41	1358404
2017		0.33	17617254.27	4.05	1365207
2010	Blora	0.26	10149079.63	7.17	422021
2011		0.35	10597723.01	2.26	835785
2012		0.37	11116865.9	3.55	840193
2013		0.35	11712504.85	7.94	844325
2014		0.33	12227201.29	7.13	848387
2015		0.33	12882587.7	2.85	852108
2016		0.33	15913432.03	2.14	855573
2017		0.35	16843360.54	2.98	858868
2010	Rembang	0.19	8373546.87	6.61	297168
2011		0.32	8803302.78	2.73	598087
2012		0.35	9277163.23	4.28	603573
2013		0.34	9780750.39	6.88	608891
2014		0.34	10284274.36	7.59	614065
2015		0.34	10850269.2	2.66	619173
2016		0.34	11418008.73	1.75	624096
2017		0.34	12123468.84	3.31	628922

2010	Pati	0.24	18782546.87	6.36	615079
2011		0.33	19893325.24	2.3	1201801
2012		0.38	21072328.7	3.92	1210001
2013		0.41	22329693.98	7.57	1217930
2014		0.39	23365213.99	8.01	1225603
2015		0.39	24752325.07	3.23	1232889
2016		0.39	26039955.34	2.31	1239989
2017		0.41	27532168.1	3.51	1246691
2010	Kudus	0.24	52933496.31	7.65	395564
2011		0.27	55175794.89	3.34	789875
2012		0.33	57440810.51	4.77	800403
2013		0.32	59944556.52	8.31	810893
2014		0.33	62600680.87	8.59	821109
2015		0.33	65041047.55	3.28	831303
2016		0.33	66688490.99	2.32	841499
2017		0.32	68649053.55	4.17	851478
2010	Jepara	0.2	13347321.26	6.24	551520
2011		0.29	14004325.03	3.59	1117784
2012		0.29	14824995.87	4.52	1135628
2013		0.3	15623738.87	7.95	1153321
2014		0.31	16374715.21	9.87	1170785
2015		0.31	17200365.92	4.57	1188289
2016		0.31	18063134.88	3.45	1205800
2017		0.3	19001040.83	2.83	1223198
2010	Demak	0.24	11647735.65	6.87	533673
2011		0.35	12275702.69	3.49	1070307
2012		0.34	12823227.04	4.1	1232889
2013		0.34	13499226.47	8.22	1094495
2014		0.37	14078419.8	8.69	1106209
2015		0.37	14913837.51	2.8	1117905
2016		0.37	15665204.77	2.27	1129298
2017		0.34	16537579.21	3.57	1140675
2010	Semarang	0.28	21572136.87	7.07	474506
2011		0.32	22925456.8	3.29	946774
2012		0.35	24306718.35	4.56	960497
2013		0.33	25758121.08	8.11	974115

2014		0.31	27264112.96	8.63	987597
2015		0.31	28769677.95	2.85	1000887
2016		0.31	30286380.79	2.39	1014198
2017		0.33	31939250.1	3.67	1027489
2010	Temanggung	0.28	9710199.27	7.35	354106
2011		0.31	10301569.79	2.42	717402
2012		0.34	10740983.02	4.73	724688
2013		0.33	11299342.97	7.01	731927
2014		0.32	11867679.59	7.81	738881
2015		0.32	12486494.54	2.74	745825
2016		0.32	13110795.64	2.42	752486
2017		0.33	13724464.81	3.12	759128
2010	Kendal	0.27	18798278.37	5.89	444710
2011		0.33	20032434.32	3.49	910494
2012		0.36	21075717.33	3.89	918798
2013		0.31	22386123.5	6.9	926791
2014		0.31	23536834.39	8.34	934627
2015		0.31	24771543.49	4.13	942283
2016		0.31	26159087.07	2.47	949682
2017		0.31	27586097.11	3.6	957024
2010	Batang	0.28	9447328.38	6.62	354506
2011		0.38	10025044.65	3.01	715506
2012		0.35	10488456.63	3.83	722596
2013		0.34	11104696.78	8.08	729591
2014		0.38	11693897.06	7.66	736497
2015		0.38	12327739.23	2.94	743090
2016		0.38	12935491.09	2.24	749720
2017		0.34	13627279.81	3.44	756079
2010	Pekalongan	0.23	10254315.35	6.54	422833
2011		0.37	10834201.09	2.65	847390
2012		0.36	11354849.9	2.96	854396
2013		0.32	12034805.89	8.18	861125
2014		0.34	12630368.82	8.32	867701
2015		0.34	13234564.04	3.42	873986
2016		0.34	13917701.83	2.96	880092
2017		0.32	14652178.71	4.01	886197

2010	Pemalang	0.2	11282296.1	7.38	637957
2011		0.28	11847199.06	2.8	1269219
2012		0.31	12477235.25	4.04	1274606
2013		0.3	13172063.61	6.52	1279581
2014		0.29	13898669.42	7.38	1284171
2015		0.29	14673369.23	3.52	1288577
2016		0.29	15463800.55	2.33	1292609
2017		0.3	16297654.01	3.64	1296281
2010	Tegal	0.3	15106509.91	6.44	702491
2011		0.28	16071820.41	2.74	1403427
2012		0.28	16912249.74	4.13	1409424
2013		0.27	18050291.97	7.79	1414983
2014		0.29	18958841.04	8.48	1420106
2015		0.29	19992675.45	3.64	1424891
2016		0.29	21265717.23	2.67	1429386
2017		0.27	22322100.13	3.58	1433515
2010	Brebes	0.23	20158107.77	6.04	863893
2011		0.26	21498422.48	3.09	1746613
2012		0.25	22482262.67	4.61	1756018
2013		0.24	23812056.92	9.83	1764982
2014		0.28	25074171.51	6.2	1773373
2015		0.28	26572834.89	3.08	1781379
2016		0.28	27867371.33	2.84	1788880
2017		0.24	29450228.81	4.24	1796004

Keterangan:

Y= Gini Rasio di kabupaten di Provinsi Jawa Tengah (persen)

X1= PDRB ADHK kabupaten di Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah)

X2= Inflasi kabupaten di Provinsi Jawa Tengah (Persen)

X3= Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)

Lampiran II

Hasil Estimasi Regresi Linier Common Effect Models

Dependent Variable: IG?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/01/18 Time: 15:54
Sample: 2010 2017
Included observations: 8
Cross-sections included: 29
Total pool (balanced) observations: 232

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.333657	0.010451	31.92707	0.0000
PDRB?	-5.92E-11	1.82E-10	-0.325698	0.7450
INFLASI?	-0.003758	0.001142	-3.289785	0.0012
JP?	1.07E-08	8.54E-09	1.248896	0.2130

R-squared	0.057409	Mean dependent var	0.324397
Adjusted R-squared	0.045006	S.D. dependent var	0.040725
S.E. of regression	0.039798	Akaike info criterion	-3.592919
Sum squared resid	0.361121	Schwarz criterion	-3.533492
Log likelihood	420.7786	Hannan-Quinn criter.	-3.568953
F-statistic	4.628791	Durbin-Watson stat	0.747344
Prob(F-statistic)	0.003655		

Lampiran III

Hasil Estimasi Regresi Linier Fixed Effect Models

Dependent Variable: IG?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/01/18 Time: 15:55
Sample: 2010 2017
Included observations: 8
Cross-sections included: 29
Total pool (balanced) observations: 232

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.

C	0.209109	0.016701	12.52105	0.0000
PDRB?	1.68E-09	7.47E-10	2.251430	0.0254
INFLASI?	-0.000756	0.000832	-0.908932	0.3645
JP?	8.64E-08	9.85E-09	8.774214	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_CILACAP--C	-0.154005			
_BANYUMAS--C	-0.029796			
_PURBALINGGA--C	-0.000267			
_BANJARNEGARA--C	0.048960			
_KEBUMEN--C	-0.025033			
_PURWOREJO--C	0.067730			
_WONOSOBO--C	0.052931			
_MAGELANG--C	-0.009453			
_BOYOLALI--C	0.027468			
_KLATEN--C	-0.001655			
_SUKOHARJO--C	0.030277			
_WONOGIRI--C	0.019802			
_KARANGANYAR--C	0.043764			
_SRAGEN--C	0.026682			
_GROBOGAN--C	0.009526			
_BLORA--C	0.038065			
_REMBANG--C	0.047654			
_PATI--C	0.024031			
_KUDUS--C	-0.065351			
_JEPARA--C	-0.037750			
_DEMAK--C	0.020254			
_SEMARANG--C	-0.012276			
_TEMANGGUNG--C	0.033933			
_KENDAL--C	-0.005878			
_BATANG--C	0.069470			
_PEKALONGAN--C	0.031158			
_PEMALANG--C	-0.049917			
_TEGAL--C	-0.067772			
_BREBES--C	-0.132553			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.619344	Mean dependent var	0.324397
Adjusted R-squared	0.560342	S.D. dependent var	0.040725
S.E. of regression	0.027003	Akaike info criterion	-4.258276
Sum squared resid	0.145835	Schwarz criterion	-3.782864
Log likelihood	525.9600	Hannan-Quinn criter.	-4.066547
F-statistic	10.49705	Durbin-Watson stat	1.567487
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran IV

Hasil Estimasi Regresi Linier Random Effect Models

Dependent Variable: IG?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/01/18 Time: 15:56
Sample: 2010 2017
Included observations: 8
Cross-sections included: 29
Total pool (balanced) observations: 232
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.276336	0.010741	25.72699	0.0000
PDRB?	-1.83E-10	2.70E-10	-0.677806	0.4986
INFLASI?	-0.002183	0.000795	-2.746951	0.0065
JP?	6.40E-08	8.33E-09	7.686292	0.0000
Random Effects (Cross)				
_CILACAP--C	-0.017359			
_BANYUMAS--C	-0.005595			
_PURBALINGGA--C	-0.013794			
_BANJARNEGARA--C	0.022307			
_KEBUMEN--C	-0.026835			
_PURWOREJO--C	0.034096			
_WONOSOBO--C	0.023584			
_MAGELANG--C	-0.009146			
_BOYOLALI--C	0.015210			
_KLATEN--C	0.000683			
_SUKOHARJO--C	0.020764			
_WONOGIRI--C	0.006944			
_KARANGANYAR--C	0.031254			
_SRAGEN--C	0.017622			
_GROBOGAN--C	0.004421			
_BLORA--C	0.015389			
_REMBANG--C	0.015251			
_PATI—C	0.026330			
_KUDUS--C	0.004942			
_JEPARA--C	-0.035323			
_DEMAK--C	0.007993			
_SEMARANG--C	-0.001652			
_TEMANGGUNG--C	0.008726			
_KENDAL--C	-0.003047			
_BATANG--C	0.037674			
_PEKALONGAN--C	0.009974			
_PEMALANG--C	-0.047824			
_TEGAL--C	-0.052321			
_BREBES--C	-0.090271			

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.020613	0.3682
Idiosyncratic random		0.027003	0.6318
Weighted Statistics			
R-squared	0.230444	Mean dependent var	0.136334
Adjusted R-squared	0.220318	S.D. dependent var	0.034117
S.E. of regression	0.030125	Sum squared resid	0.206918
F-statistic	22.75826	Durbin-Watson stat	1.112844
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.119340	Mean dependent var	0.324397
Sum squared resid	0.428837	Durbin-Watson stat	0.536959

Lampiran V

Nilai Intersep Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten	C	Koefisien
CILACAP	0.209109	0.055104
BANYUMAS	0.209109	0.179313
PURBALINGGA	0.209109	0.208842
BANJARNEGARA	0.209109	0.258069
KEBUMEN	0.209109	0.184076
PURWOREJO	0.209109	0.276839
WONOSOBO	0.209109	0.26204
MAGELANG	0.209109	0.199656
BOYOLALI	0.209109	0.236577
KLATEN	0.209109	0.207454
SUKOHARJO	0.209109	0.239386
WONOGIRI	0.209109	0.228911
KARANGANYAR	0.209109	0.252873
SRAGEN	0.209109	0.235791
GROBOGAN	0.209109	0.218635
BLORA	0.209109	0.247174
REMBANG	0.209109	0.256763
PATI	0.209109	0.23314
KUDUS	0.209109	0.143758
JEPARA	0.209109	0.171359
DEMAK	0.209109	0.229363
SEMARANG	0.209109	0.196833

TEMANGGUNG	0.209109	0.243042
KENDAL	0.209109	0.203231
BATANG	0.209109	0.278579
PEKALONGAN	0.209109	0.240267
PEMALANG	0.209109	0.159192
TEGAL	0.209109	0.141337
BREBES	0.209109	0.076556